

**PERUBAHAN ORGANISASIONAL DINAS PERIKANAN
SEBAGAI KONSEKUENSI DARI PERATURAN BUPATI
NOMOR 284 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS
PERIKANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh:
M.Fachrie Apriadi
07011381924204**

**Dosen Pembimbing :
Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
NIP. 197905012002121005**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PERUBAHAN ORGANISASIONAL DINAS PERIKANAN SEBAGAI KONSEKUENSI DARI PERATURAN BUPATI NOMOR 284 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

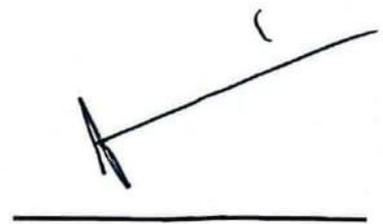
M. FACHRIE APRIADI

07011281924204

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, September 2023

Pembimbing,

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005



**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



Dr. M. Nurbudiyanto, S.Sos., M.PA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**PERUBAHAN ORGANISASIONAL DINAS PERIKANAN
SEBAGAI KONSEKUENSI DARI PERATURAN BUPATI
NOMOR 284 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS
PERIKANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

SKRIPSI

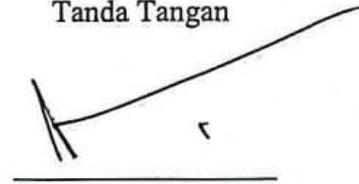
Oleh :
M. Fachrie Apriadi
07011381924204

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 4 Januari 2024

Pembimbing :

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
NIP. 197905012002121005

Tanda Tangan



Penguji :

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

Tanda Tangan



Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP, M.AP
NIP. 198701052015041003



Mengetahui,



Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fachrie Apriadi
NIM : 07011381924204
Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi Saya yang berjudul “Perubahan Organisasional Dinas Perikanan Sebagai Konsekuensi Dari Peraturan Bupati Nomor 284 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin” ini adalah benar-benar hasil karya Saya sendiri dan Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau terdapat pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, Saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada Saya.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan

Indralaya, September 2023



M. Fachrie Apriadi

NIM. 07011381924204

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

” Sebelum Menjadi Guru, Dokter, Seniman Atau Pemegang Kekuasaan
Jadilah Manusia “

Atas Rahmat Tuhan Yang maha Esa Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk Kedua
Orang Tua Saya

ABSTRAK

Perubahan organisasional merupakan proses perubahan keadaan sebuah organisasi dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana perubahan organisasi di Dinas Perikanan terjadi, bagaimana perencanaan, pelaksanaan, serta dampak dari adanya perubahan organisasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui wawancara bersama dengan beberapa informan menghasilkan data yang dianalisis menggunakan teori perubahan organisasi menurut Kurt Lewin yang terdiri dari dimensi unfreezing, movement, dan refreezing. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan organisasional Dinas Perikanan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 284 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin sudah mencapai pada kategori baik. Pada tahap diterapkannya perubahan dilakukan, pegawai Dinas perikanan sempat mengalami penurunan kinerja namun hal tersebut tidak bertahan lama karena adanya upaya penekanan integritas pegawai. Pada sisi lain, Dinas perikanan sudah memenuhi indikator lain dalam melaksanakan perubahan mulai dari pengurangan faktor resistensi hingga stabilisasi perubahan itu sendiri.

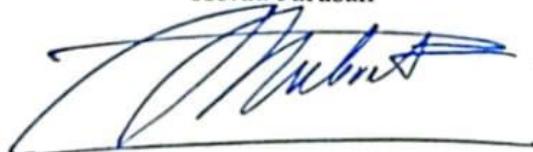
Kata Kunci : Perubahan Organisasional, Aparatur Sipil Negara, Kebijakan.

Pembimbing,

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
NIP. 197905012002121005

Indralaya, September 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

Organizational change is the process of changing the state of an organization from the current state to the desired future with the aim of increasing organizational effectiveness. The purpose of this research is to see how organizational changes in the Fisheries Service occur, how planning, implementation, and the impact of these organizational changes. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach. Through interviews with several informants, data were analyzed using Kurt Lewin's theory of organizational change which consists of unfreezing, movement, and refreezing dimensions. The results of this study indicate that the organizational changes of the Fisheries Service based on Regent Regulation Number 284 of 2021 concerning the Organizational Structure of Duties and Functions of the Fisheries Service of Musi Banyuasin Regency have reached the good category. At the stage of implementing the changes, employees of the Fisheries Service had experienced a decline in performance, but this did not last long because of efforts to suppress employee integrity. On the other hand, the Fisheries Service has met other indicators in implementing changes ranging from reducing resistance factors to stabilizing the change itself.

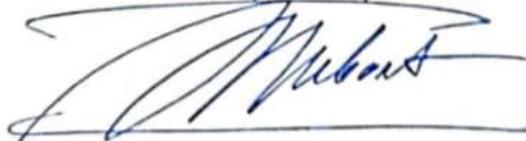
Keyword : Organizational Change, State Civil Apparatus, Policy.

Advisor,

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
NIP. 197905012002121005



Indralaya, September 2023
Knowing,
Chairman of The Department



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT, ka rena izin-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Perubahan Organisasional Dinas Perikanan Sebagai Konsekuensi Dari Peraturan Bupati Nomor 284 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin”.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi penyempurnaan kualitas tulisan ini. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya yang disampaikan kepada :

1. **Allah SWT** yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar.
2. **Nabi Muhammad SAW** yang telah menyampaikan petunjuk atas kehidupan yang terang benderang.
3. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan, nasihat dan kasih sayang sedari lahir hingga saat ini.
4. Bapak **Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Prof. Dr. Alfitri, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak **Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA.** Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
7. Bapak **Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dalam memberikan arahan selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan **Administrasi Publik terkhusus Kelas B Indralaya Angkatan 2019** yang telah kebersamai peneliti selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peneliti dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Tanpa dukungan pihak-pihak tersebut peneliti tidak mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semua usaha yang telah peneliti berikan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, namun tentunya tidak dapat terlepas dari kesalahan, maka dari itu peneliti menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan di waktu mendatang. Atas kerjasama dan perhatiannya, peneliti ucapkan terimakasih.

Indralaya, 4 Januari 2024

M. Fachrie Apriadi

NIM. 07011381924204

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.4.1 Manfaat Praktis	14
1.4.2 Manfaat Teoritis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.2 Manajemen Organisasi	16
2.2.1 Pengertian Manajemen Publik.....	16
2.2.2 Pengertian Organisasi	18
2.3 Perubahan Organisasi.....	20
2.4 Susunan Organisasi.....	25
2.5 Teori yang digunakan	27
2.6 Penelitian Terdahulu.....	30
2.7 Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis Penelitian	37
3.3 Fokus Penelitian	38
3.4. Jenis Dan Sumber Data	40
3.5 Informan Penelitian	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	41

3.7. Teknik Analisis Data	43
3.8 Teknik Keabsahan Data	44
3.9. Sistematika Penulisan	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Instansi.....	47
4.1.1 Profil Dinas Perikanan Musi Banyuasin	47
4.1.2 Visi Dan Misi Dinas Perikanan Musi Banyuasin.....	48
4.1.3 Struktur Organisasi.....	49
4.2 Deskripsi Informan Penelitian	50
4.3 Hasil Penelitian Dan Pembahasan	51
4.3.1 <i>Unfreezing</i>	54
4.3.2 <i>Movement</i>	64
4.3.3 <i>Refreeze</i>	70
4.4 Pembahasan	77
BAB V PENUTUP.....	83
5.1 Kesimpulan	83
5.1.1 <i>Unfreezing</i>	84
5.1.2 <i>Movement</i>	85
5.1.3 <i>Refreezeeng</i>	85
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin..	4
Gambar 2 Model Perubahan Organisasi Menurut Kurt Lewin	22
Gambar 3 Gedung Dinas Perikanan Musi Banyuasin.....	47
Gambar 4 Struktur Organisasi Dinas Perikanan	50
Gambar 5 Diskursus Struktur Baru dan Struktur Lama	53
Gambar 6 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Sebelum Perubahan	56
Gambar 7 Kegiatan Rapat Kepemimpinan Dinas Perikanan	58
Gambar 8 Data Pegawai Dinas Perikanan Musi Banyuasin Tahun 2022	60
Gambar 9 Perjanjian Kinerja Pegawai Dinas Perikanan Musi Banyuasin.....	63
Gambar 10 Apel Pagi dan Pengarahan Pegawai Dinas Perikanan Musi Banyuasin .	65
Gambar 11 Pelatihan dan Pengembangan Diri Pegawai Dinas Perikanan Musi Banyuasin.....	66
Gambar 12 Surat Penyampaian Penempatan Pegawai Dinas Perikanan Yang Telah mengikuti Diklat Pelatihan ke BPKPSDM Musi Banyuasin.....	69
Gambar 13 Contoh Pelatihan Pegawai di Lingkungan Dinas Perikanan.....	72
Gambar 14 Evaluasi Kinerja Dinas Perikanan Musi Banyuasin.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Susunan Organisasi Dinas Perikanan Musi Banyuasin.....	6
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3 Fokus Penelitian.....	40
Tabel 4 Informan Penelitian.....	50
Tabel 5 Data Pegawai Dinas Perikanan Musi Banyuasin Sebelum Perubahan Organisaisonal	57
Tabel 6 Data Diklat Pegawai Dinas Perikanan Musi Banyuasin Tahun 2022.....	67
Tabel 7 Data Fasilitas Dinas Perikanan Musi Banyuasin 2022	74
Tabel 8 Matriks Hasil Temuan Penelitian.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan adalah keniscayaan dalam perkembangan dunia yang selalu bergerak maju dan berubah seiring berjalannya waktu. Terlebih lagi, perubahan seringkali harus dimulai dari dalam diri manusia, karena sikap dan kemampuan individu untuk beradaptasi dan tumbuh sangat memengaruhi kualitas hidup mereka. Dalam konteks organisasi dan lembaga, perubahan juga adalah hal yang tak terhindarkan. Organisasi yang tetap statis dan tidak responsif terhadap perubahan dalam lingkungan mereka akan kesulitan untuk bertahan dan berkembang. Dengan demikian, perubahan dalam organisasi merupakan suatu kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, teknologi, dan tuntutan masyarakat.

Penting untuk memahami bahwa perubahan bukan hanya tentang beradaptasi dengan zaman yang serba modern, tetapi juga tentang menjadi inovatif dan proaktif dalam menciptakan perubahan yang bermanfaat. Ketika organisasi memiliki kemampuan untuk mengelola perubahan dengan baik, mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif dan efisien. Dalam konteks penelitian tentang Perubahan Organisasi Dinas Perikanan sebagai konsekuensi dari Peraturan Bupati, pemahaman tentang pentingnya perubahan dan adaptasi sangat relevan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana organisasi menghadapi perubahan, apakah mereka mampu beradaptasi dengan baik, dan dampak apa yang mungkin muncul sebagai hasil dari perubahan tersebut. Ini adalah informasi berharga yang dapat membantu organisasi dalam merencanakan dan mengelola perubahan di masa depan dengan lebih baik. Perubahan organisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai

pembahasan mengenai mengapa, kapan dan bagaimana organisasi melakukan perubahan (Hatch, 1997).

Dunia telah memasuki era perubahan dan transformasi yang cepat, ditandai dengan perkembangan teknologi dan sosial, meningkatnya persaingan antar negara, dan keinginan akan kebebasan dan demokrasi. Organisasi atau instansi mencari teknik, program, visi misi dan pimpinan yang dapat menyesuaikan dengan tingkat perubahan yang kompleks. Perubahan Organisasi berproses untuk dilakukannya perpindahan masa yang sekarang ataupun telah lalu menuju kearah masa depan yang diharapkan dengan target mencapai efektivitas organisasi. Tujuannya ialah guna mencari alternatif baru dalam memanfaatkan sumber daya serta peningkatan kemampuan untuk meningkatkan nilai dan hasil yang dapat diberikan kepada stakeholders.

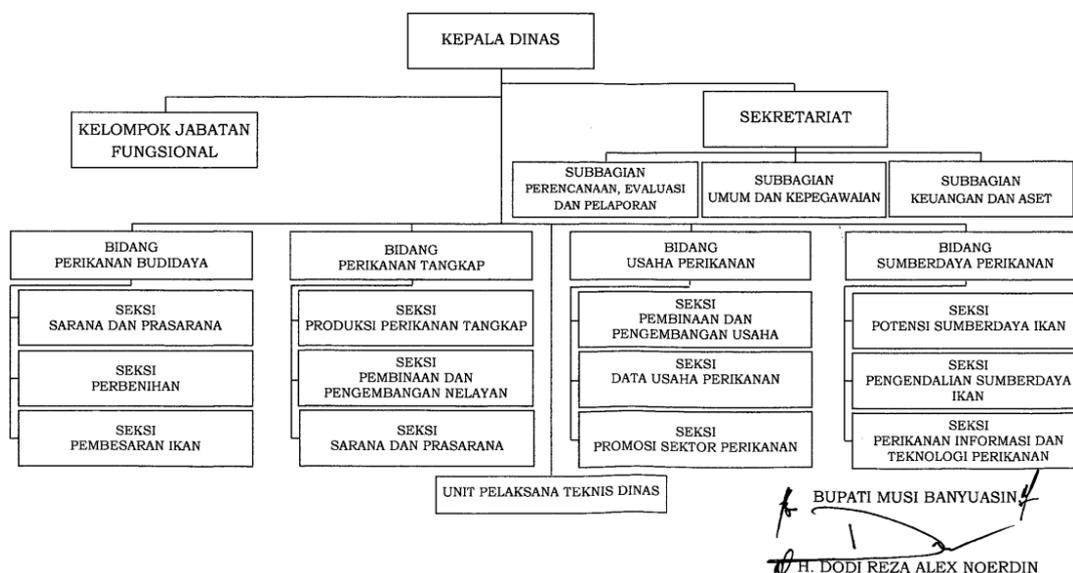
Saat ini terkait dengan birokrasi pemerintahan yang ada di Kabupaten/Kota di Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan terkait dengan in-efisiensi dan in-efektivitas dalam pelaksanaan kinerja organisasinya. Permasalahan tersebut disebabkan oleh masih gemuknya struktur OPD di instansi pemerintahan (Susiawati dalam Praja, 2021). Gemuknya struktur OPD ini akan berakibat pada pencapaian tujuan organisasi, seperti yang terjadi pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin. Tertulis dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2023-2026, bahwa permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia baik dari segi kualitas dan kuantitas khususnya pegawai negeri sipil dengan basik Pendidikan perikanan. Selain itu, masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, usaha peperikanan,

sumber daya perikanan, serta Balai Benih Ikan dan PPI PUD yang menyebabkan belum maksimalnya kinerja sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan.

Terlihat pada tahun 2021 terkait tujuan bidang produksi perikanan budidaya hanya tercapai sebesar 95,04 dari target sebesar 216,36 atau hanya tercapai sebesar 44%. Dibandingkan pada tahun sebelumnya yang pencapaian bidang ini sebesar 98%. Penurunan ini disebabkan oleh aliran anggaran yang mengalir ke masyarakat terhambat serta banyaknya dana hibah dari luar yang masuk sehingga terjadinya industrialisasi perikanan di luar kendali pemerintah. Keterlambatan aliran anggaran pada Dinas perikanan disebabkan oleh hambatan ruang gerak dari Dinas Perikanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya akibat dari gemuknya birokrasi yang ada. Ditambah masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan pada bidang kelautan dan perikanan khususnya dalam adopsi teknologi informasi (Renstra Dinas Perikanan 2023-2026).

Sebelumnya struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin seperti yang tertera pada Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin terlihat sebagai berikut:

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin



Sumber : Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 109 Tahun 2018

Bagan tersebut menunjukkan masih gemuknya struktur organisasi Dinas Perikanan Musi Banyuasin. Terlihat masih banyaknya pembagian seksi pada setiap bidang. Hal ini membuat alur birokrasi yang masih berbelit, mengakibatkan pelayanan dan kinerja yang diberikan masih belum mencapai efektivitas dan efisien. Selain itu menyebabkan anggaran yang diperlukan mengalami pembekakan.

Terkait permasalahan tersebut, salah satu solusi untuk menangani permasalahan yang ada yaitu dengan dilakukannya penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional yang didukung optimalisasi jabatan fungsional. Keberadaan struktur organisasi yang efektif dan efisien menjadi kebutuhan utama setiap organisasi pemerintah untuk melakukan peningkatan kinerja pemerintah. Menurut Mintzberg (1993), sebuah birokrasi yang profesional berisikan alur atau birokrasi yang memiliki kemampuan menyelesaikan sebuah tugas yang memiliki spesialisasi, membutuhkan profesionalitas yang terlatih. Kekuatan sebuah birokrasi yang professional terletak pada *operating core*. Hal inilah

yang mendasari sebuah struktur birokrasi professional memiliki keanggotaan spesialis yang telah terlatih terutama pada unsur operating core

Penyederhanaan yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan di bawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin, ditargetkan selesai pada akhir Desember 2020. Selain memangkas struktural menjadi dua level, pemangkasan lembaga atau badan juga ditargetkan selesai pada kurun waktu tersebut. Penyederhanaan birokrasi wajib dilakukan oleh seluruh instansi, baik pusat maupun daerah, “Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” Mendukung hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan, “semua instansi pusat dan daerah harus tegak lurus dengan perintah Presiden. Jangan sampai ada yang memperlambat target dari misi Presiden dan Wakil Presiden” Bupati Musi Banyuasin melakukan perubahan peraturan pada Dinas Perikanan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan pemerintah daerah, penataan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi dinas perikanan, telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat nomor 061/4022/VII/2021 tanggal 17 Desember 2021 dan adaptasi dari peraturan menteri kelautan bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 109 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Perikanan Musi Banyuasin telah berganti dengan peraturan bupati terbaru nomor 284 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi

Dinas Perikanan Musi Banyuasin. Secara singkatnya inti dari peraturan tersebut diuraikan pada table 1 berikut.

Tabel 1 Susunan Organisasi Dinas Perikanan Musi Banyuasin

Kepala Dinas
Sekretariat Subbagian Umum Dan Kepegawaian Jabatan Fungsional
Bidang Perikanan Dan Tangkap Jabatan Fungsional
Bidang Usaha Perikanan Jabatan Fungsional
Bidang Perikanan Budidaya Jabatan Fungsional
Bidang Sumber Daya Perikanan Jabatan Fungsional
Unit Pelaksana Teknis

Sumber: Diolah penulis dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin no 284 Tahun 2021

Dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 284 Tahun 2021, tupoksi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin telah ditetapkan dengan jelas. Kepala Dinas Perikanan memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam tugas perbantuan bupati dalam menyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah terkait perikanan budidaya, perikanan tangkap, usaha perikanan, dan sumber daya perikanan. Perancangan rencana kegiatan juga program yang ada di bidang perikanan juga merupakan bagian penting dari tanggung jawab Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas Perikanan bertanggung jawab atas aspek administratif, manajemen, dan koordinasi yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas. Selain itu, berbagai bidang seperti Perikanan dan Tangkap, Usaha Perikanan, Perikanan

Budidaya, dan Sumber Daya Perikanan memiliki peran khusus dalam mengelola berbagai aspek perikanan di Kabupaten Musi Banyuasin. Bidang Perikanan dan Tangkap terkait dengan pengelolaan perikanan tangkap, sementara Bidang Usaha Perikanan berfokus pada pengembangan bisnis dan industri perikanan.

Bidang Perikanan Budidaya bertanggung jawab atas pengelolaan budidaya ikan dan organisme air lainnya, sedangkan Bidang Sumber Daya Perikanan fokus pada pemantauan dan pemeliharaan ekosistem perairan serta sumber daya perikanan. Keseluruhan tugas dan fungsi ini telah dirancang untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan dalam sektor perikanan di Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan kebijakan daerah dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Dibidang Perikanan

- a. Pengendalian pada terlaksananya Kegiatan dan program bidang Perikanan
- b. Pelaksanaan pembinaan pegawai yang ada di Dinas Perikanan
- c. Pelaksanaan pembimbingan teknis serta Administrative pada Unit Pelaksana Teknis Dinas juga Pejabat Fungsional yang ada di Dinas Perikanan
- d. Memonitor dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bawahan guna pencapaian sasaran yang sesuai dengan target program serta ketentuan yang berlaku
- e. Penilaian Prestasi Kerja Bawahan guna menjadi bahan pertimbangan untuk diadakannya pengembangan karir
- f. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi, Saran Dan Pertimbangan terhadap tupoksi yang diemban kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Sekretariat memiliki tupoksi untuk melakukan pelayanan teknis serta administrative juga koordinasi pelaksanaan tugas yang ada di Dinas Perikanan

Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan, Rencana, Program, Kegiatan, Dan Anggaran Dibidang Perikanan Serta Tugas Pembantuan Dibidang Perikanan.

- a. Pengelolaan data dan informasi dibidang perikanan
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama dibidang perikanan
- c. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang perikanan
- d. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana dilingkungan Dinas Perikanan
- e. Pengelolaan bidang perencanaan dan penyelenggaraan tugas perbantuan, keuangan dan BMD juga bidang Umum Dan Kepegawaian dilingkungan daerah
- f. Pengoordinasian Dan Penyusunan Bahan Publikasi Dan Hubungan Masyarakat Dibidang Perikanan
- g. Pengoordinasian Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Perikanan
- h. Pengelolaan Asset Barang Milik Daerah Dilingkungan Dinas Perikanan
- i. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan Dan Kerumahtanggaan Dilingkungan Dinas Perikanan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lainnya Yang Diberikan Oleh Pimpinan

Bidang Perikanan Dan Tangkap Mempunyai Tugas Melaksanakan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Produksi Perikanan Dan Tangkap, Pengembangan Dan Pembinaan Nelayan, Serta Sarana Dan Prasarana Dan Penyusunan Bahan Program Kegiatan Di Bidang Perikanan Dan Tangkap.

- a. Penyusunan Rencana Program Perikanan Dan Tangkap Untuk Program Kerja Tahunan, Jangka Menengah Dan Jangka Panjang Sebagai Acuan Dan

Pedoman Dalam Pelaksanaan Tugas Pengembangan Dan Peningkatan Program Perikanan Dan Tangkap

- b. Pembagian Tugas Kepada Bawahan Sesuai Dengan Bidangny
- c. Penilaian Prestasi Kerja Atau Kinerja Bawahan Sebagai Bahan Pembinaan Dan Pengembangan Karir
- d. Penyusunan Rencana Dan Melakukan Kerjasama Dengan Berbagai Pihak Dalam Rangka Peningkatan Produktifitas Perikanan Dan Tangkap
- e. Pelaksanaan Sosialisasi Program Dan Penyebaran Informasi Pengembangan Perikanan Dan Tangkap
- f. Pelaksanaan Kebijakan Sarana Penangkapan Ikan Serta Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
- g. Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dibidang Perikanan Dan Tangkap
- h. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dengan Program Bidang Perikanan Dan Tangkap
- i. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Bagi Produktifitas Dan Pengembangan Perikanan Dan Tangkap
- j. Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Dikegiatan Lelang Lebak Lebung
- k. Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Perikanan Dan Tangkap Untuk Statistic Tangkap Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lainnya Yang Diberikan Oleh Pimpinan.

Bidang Usaha Perikanan Mempunyai Tugas Melaksanakan Sebagian Tugas Dinas Perikanan Yang Berkaitan Dengan Pembinaan Dan Pengembangan Usaha, Data Usaha Perikanan Serta Promosi Sektor Perikanan Penyusunan Rencana Program

Usaha Perikanan Baik Program Kerja Tahunan, Jangka Menengah Dan Jangka Panjang Dalam Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dan Pengembangan Usaha, Data Usaha Perikanan Dan Promosi Disektor Perikanan.

- a. Pembagian Tugas Kepada Bawahan Sesuai Dengan Bidangny
- b. Penyusunan Bahan Penetapan Sasaran Produksi Perikanan Dari Hasil Pengolahan Produk Perikanan
- c. Penyusunan Bahan Petunjuk Dan Pengembangan Produksi Serta Peningkatan Produktifitas Dibidang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha, Data Usaha Perikanan Dan Promosi Disektor Perikanan
- d. Penyusunan Bahan Pembinaan Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Usaha, Data Usaha Perikanan Dan Promosi Sektor Perikanan
- e. Pelaksanaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dibidang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha, Data Usaha Perikanan Dan Promosi Sektor Perikanan
- f. Pelaporan Pelaksanaan Dibidang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha, Data Usaha Perikanan Dan Promosi Sektor Perikanan

Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lainnya Yang Diberikan Oleh Pimpinan

Bidang Perikanan Budidaya Mempunyai Tugas Melaksanakan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Pembenihan, Pembesaran Ikan Dan Sarana Dan Prasarana Serta Penyusunan Bahan Program Kegiatan Dibidang Perikanan Budidaya.

- a. Penyusunan Rencana Program Perikanan Budidaya Untuk Program Kerja Tahunan Jangka Menengah Dan Jangka Panjang Sebagai Acuan Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengembangan Dan Peningkatan Program Perikanan Budidaya
- b. Pembagian Tugas Kepada Bawahan Sesuai Dengan Bidangny

- c. Penilaian Prestasi Kerja Atau Kinerja Bawahan Sebagai Bahan Pembinaan Dan Pengembangan Karir
- d. Penyusunan Rencana Dan Melakukan Kerjasama Dengan Berbagai Pihak Dalam Rangka Peningkatan Produktifitas Perikanan Budidaya
- e. Pelaksanaan Peningkatan Pelatihan Bagi Kelompok Pembenihan Dan Pembudidayaan Ikan
- f. Pelaksanaan Sosialisasi Program Dan Penyebaran Informasi Pengembangan Perikanan Budidaya
- g. Pemberian Bimbingan Teknis Terhadap Kualitas Mutu Tenaga Perbenihan, Pembudidaya Dan Pengembangan Perikanan Budidaya
- h. Pelaksanaan Pembinaan Dan Pedampingan Bagi Pembudidayaan Dan Kelompok-Kelompok Pembudidaya Ikan
- i. Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Bidang Perikanan Budidaya
- j. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Bagi Produktifitas Dan Pengembangan Perikanan Budidaya
- k. Pemberi Petunjuk Kepada Bawahan Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas
- l. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dan Program Bidang Perikanan Budidaya
- m. Pengolahan Dan Pengumpulan Data Perikanan Budidaya Untuk Statistic Perikanan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lainnya Yang Diberikan Oleh Pimpinan.

Bidang Sumber Daya Perikanan Mempunyai Tugas Melaksanakan Sebagian Tugas Dinas Perikanan Yang Berkaitan Dengan Penyiapan, Perumusan, Dan

Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Sumber Daya Perikanan, Potensi Sumber Daya Perikanan, Pengendalian Sumber Daya Ikan, Serta Informasi Dan Teknologi Perikanan Dibidang Sumber Daya Perikanan Penyusunan Rencana Program Perikanan Budidaya Untuk Program Kerja Tahunan Jangka Menengah Dan Jangka Panjang Sebagai Acuan Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengembangan Dan Peningkatan Program Sumber Daya Perikanan.

- a. Pembagian Tugas Kepada Bawahan Sesuai Dengan Bidangnyanya
- b. Penilaian Prestasi Kerja Atau Kinerja Bawahan Sebagai Bahan Pembinaan Dan Pengembangan Karir
- c. Penyusunan Rencana Dan Melakukan Kerjasama Dengan Berbagai Pihak Dalam Rangka Peningkatan Produktifitas Sumber Daya Perikanan
- d. Penyusunan Bahan Perumusan Dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Sumber Daya Perikanan
- e. Penyusunan Bahan Pembinaan Penetapan Sasaran Dibidang Sumber Daya Perikanan
- f. Penyusunan Bahan Pembinaan Informasi Dan Teknologi Dibidang Sumber Daya Perikanan
- g. Penyusunan Bahan Data Potensi Sumber Daya Perikanan Dan Data Statistik Perikanan Dibidang Sumber Daya Perikanan
- h. Penyusunan Bahan Petunjuk Dan Bimbingan Kebijakan Dibidang Perikanan
- i. Penyusunan Bahan Perumusan Tata Operasional Pengendalian, Sarana Dan Prasarana Serta Pembinaan Kepada Kelompok Masyarakat Pengawasan (Pokmaswas)

- j. Penyusunan Bahan Inventarisasi, Penyusunan Rencana Dan Pengembangan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lainnya Yang Diberikan Oleh Pimpinan.

Agar terlaksananya peraturan Bupati maka diperlukan perubahan organisasi untuk menemukan tupoksi dan kebijakan pada Dinas Perikanan. Tahapan perubahan organisasi menurut kurt lewin (*lewin's three step model*) 1951 *force field theory of change* sebagai berikut: *Unfreezing* (pencairan), *Movement* (pergerakan), *Refreezing* (pembekuan). Dengan tahapan perubahan menurut kurt lewin peraturan yang mengalami perubahan pada Dinas Perikanan dapat meningkatkan kinerjanya.

Perubahan organisasi yang dilakukan menarik peneliti untuk mengetahui bagaimana proses atau tahapan dalam menentukan perubahan yang sesuai dan lebih baik maka diperlukan dengan kajian dengan judul “Perubahan Organisasional Dinas Perikanan Sebagai Konsekuensi Dari Peraturan Bupati Nomor 284 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perubahan Organisasional Dinas Perikanan sebagai konsekuensi dari Peraturan Bupati Nomor 284 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah sebelumnya maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk memahami, mengidentifikasi dan menganalisis Perubahan Organisasional Dinas Perikanan sebagai konsekuensi dari Peraturan Bupati Nomor

284 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan referensi dan sumbangan pengetahuan mengenai perkembangan ilmu administrasi publik, khususnya konsentrasi manajemen mengenai Perubahan Organisasional Dinas Perikanan Sebagai Konsekuensi Dari Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan informasi bagi instansi ataupun organisasi lainnya dengan teori tahapan perubahan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2018). Pengaruh perubahan organisasi dan budaya organisasi terhadap peningkatan efektivitas kerja karyawan pada PT. Telokm Regional VII Sulawesi Selatan. *Research in Management*, 2(1), 51–56.
- Ambarwati, S. (2003). Mengelola perubahan organisasional: Isu peran kepemimpinan transformasional dan organisasi pembelajaran dalam konteks perubahan. *Jurnal Siasat Bisnis*, 1(2), 155–176.
- Anindita, N. S., & Gani, F. (2019). Perubahan struktur organisasi dan dampaknya terhadap layanan dan sumber daya manusia: Studi kasus di Pusat Data dan Laayanan Informasi Perum LKBN Antara. *Jurnal Studi Manajemen Organisasi*, 16(1), 1–17.
- Ansen, Y. (2002). Dampak perubahan dan pengembangan organisasi terhadap produktivitas perusahaan. *Jurnal Study dan Management*, 4(1), 37–47.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar.
- Hakim, L., & Sugiyanto, E. (2018). Manajemen perubahan organisasi sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan di industri batik laweyan Surakarta. *BENEFIT : Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 49–63.
- Hatch, M. J. (1997). *Organization theory: Modern, symbolic and postmodern perspectives*. Oxford University Press.
- Mintzberg, H. (1993). *Structure in fives: Designing effective organization*. Prentice Hall.
- Nurlia. (2019). Perubahan struktur organisasi dinas pengendalian pertanahan daerah menjadi kantor pengendalian pertanahan daerah Kabupaten Sleman (kajian studi perda 08 tahun 2014). *MERAJA*, 2(1), 51–66.
- Paryanto, & Utami, W. B. (2014). Perubahan organisasional yang efektif. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 15(1), 60–69.
- Praja, B. A. (2021). Dampak perubahan organisasi pemerintah terhadap komunikasi organisasi. *Journal Publicuho*, 4(2), 217–224. <https://doi.org/DOI:10.35817/jpu.v4i2.17700>

- Rosdiana, N., & Aslami, N. (2022). Model-model utama manajemen perubahan dalam pemikiran kurt lewin. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis Digital*, 1(2), 251–256.
- Sayidah, N. (2012). Perubahan organisasi dalam analisis diskursus. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 2(1), 1–17.
- Siagian, S. P. (2016). *Filsafat administrasi*. Gunung Agung.
- Subrata, G., & Tamrin, M. (2018). Pengaruh perubahan struktur organisasi terhadap tingginya turn over intention. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Kontemporer*, 4(1).
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. PT. Grasindo.
- Terry, G. R. (2005). *Prinsip-prinsip manajemen*. Bumi Aksara.
- Wahyudi, W., Bahrudin, U., & Sembiring, E. S. K. (2022). Perubahan struktur organisasi: Bagaimana implikasinya terhadap peluang karier dan perilaku kewargaan organisasi? *Jurnal Integrasi Sumber Daya Manusia*, 1 (1), 31–39. <https://doi.org/10.56721/jidsm.v1i1.63>
- Wijayanti, I. D. S. (2008). *Manajemen*. Mitra Cendekia Press.
- Humas MENPANRB. (2020, Agustus 16). *Penyederhanaan Birokrasi, Semua Instansi Harus Tegak Lurus Laksanakan Visi Misi Presiden dan Wapres RI*. Retrieved from Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/penyederhanaan-birokrasi-semua-instansi-harus-tegak-lurus-laksanakan-visi-misi-presiden-dan-wapres-ri>